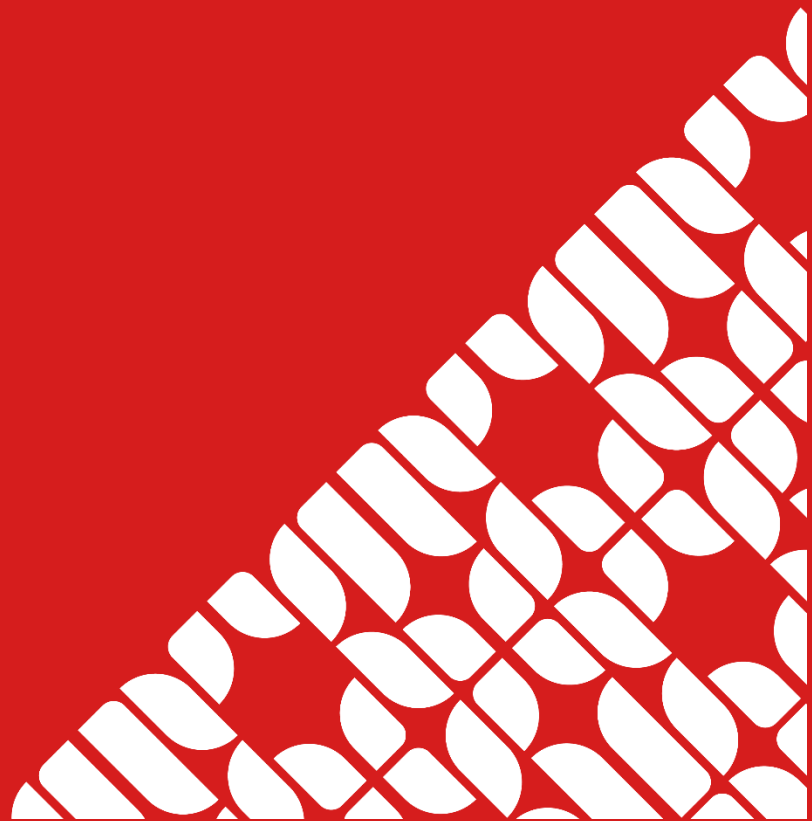




HARI PAHLAWAN 2022

**PAHLAWANKU  
TELADANKU**

**PROFIL PENERIMA GELAR  
PAHLAWAN NASIONAL RI  
PADA PERINGATAN  
HARI PAHLAWAN TAHUN 2022**



## PRAKATA

Setiap kali memperingati Hari Pahlawan, kita akan selalu teringat kata-kata bijak “Bangsa Yang Besar adalah Bangsa yang dapat menghargai Jasa-Jasa Pahlawannya” Indonesia sebagai salah satu negara besar mempunyai sejarah yang panjang dalam menegakkan kedaulatan wilayahnya dari pendudukan penjajah dan terkenal mempunyai pejuang-pejuang yang heroik, gagah berani, tidak gentar melawan siapapun yang mencoba mengganggu kedaulatan Bangsa.

Sesuai pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan” pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 yang mengambil tema “Pahlawanku, Teladanku”, dilaksanakan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 96/TK/Tahun 2022 tanggal 3 November 2022, Presiden menetapkan untuk menganugerahkan Gelar “Pahlawan Nasional” kepada 5 orang, atas perjuangan, pengabdian, darma bakti dan karya yang luar biasa kepada Negara dan Bangsa Indonesia.

Semoga dengan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tersebut diatas, kita dapat menunjukkan diri sebagai bangsa yang dapat menghargai jasa maupun karya putra-putri terbaik bangsa Indonesia, dan sekaligus dapat menjadi contoh dan teladan bagi putra-putri bangsa Indonesia lainnya serta menjadi motivasi dan pendorong untuk mengikuti jejak menjadi yang terbaik bagi negara dan bangsa Indonesia.

Jakarta, November 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>GELAR</b> .....	<b>1</b>
1. DR. dr. H. R. Soeharto Sastrosuoyoso, Tokoh dari Provinsi Jawa Tengah .....	2
2. Almarhum KGPAK Paku Alam VIII .....	9
3. Almarhum Dokter Raden Rubini Natawisastra .....	13
4. Almarhum Haji Salahuddin Bin Talabuddin .....	17
5. Almarhum Raden Aria Wangsakara .....	20

## GELAR



## 1. Almarhum DR. dr. H. R. Soeharto Sastrosoeyoso, Tokoh dari Provinsi Jawa Tengah



### A. RIWAYAT HIDUP

- Nama lengkap : DR. dr. H. R. Soeharto Sastrosoeyoso
- Tempat, tanggal lahir : Tegalondo, Surakarta, 24 Desember 1908
- Orang tua
- Ayah : R. Sastrosuyoso
  - Ibu : Hermina
- Wafat : 30 November 2000
- Tempat Pemakaman : TPU Tanah Kusir, Jakarta.
- Status Pernikahan : Menikah
- Istri : 1. Titi Paraati (Wafat 1981), Menikah pada 13 Oktober 1933 dan pernikahan berakhir cerai hidup pada 26 Mei 19622.  
2. R. A. Sinta Lente Kaliente Dewi Tejasukmana (Wafat 24 Agustus 1993) Menikah pada 29 Desember 1962 dan pernikahan berakhir cerai mati pada 1993
- Anak dari Titi Parati : 1. Semiarto Soeharto  
2. Pratiwi Soeharto Hoetomo, BA  
3. Paraati Soeharto
- Anak dari R. A. Sinta Lente Kaliente Dewi : 1. Ir Dewi Arimbi Soeharto  
2. Dewi Kamaratih Soeharto, SH  
3. Dr. Dewi Prabarini Soeharto, SpOG  
4. Dewi Surijawati Soeharto, SH  
5. Dewi Kurnia Lestari Soeharto, SE  
6. Bambang Radityo Nugroho Soeharto, SH
- Pendidikan : DR. R. Soeharto melangsungkan pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS) di Solo dan Madiun. Setelah lulus dari ELS, beliau melanjutkan pendidikan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Beliau lulus Pendidikan 16 Mei 1925. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di AMS B (Persiapan Pendidikan Tinggi Jurusan B Sekolah Menengah) dan lulus pada 19 Mei 1928. Beliau melanjutkan Pendidikan di Facultas Medica Bataviensis, Bataviase Geneeskundige Hoogeschool (GHS), saat ini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus pada 25 Mei 1935. Sejak lulus dari Geneeskundige Hoogeschool (GHS) dan kemudian membuka praktik di Kramat Raya No. 128 pada 1 Januari 1937, nama DR. R. Soeharto dikenal luas kalangan masyarakat Jakarta.

## B. RIWAYAT PERJUANGAN

### 1. Masa Pergerakan Nasional

Semasa muda, DR. R. Soeharto aktif dalam organisasi. Salah satunya beliau ikut bergabung dalam Jong Java. Jong Java merupakan organisasi pergerakan nasional yang dahulu dikenal sebagai Tri Koro Dharmo. Penggerak utama Jong Java merupakan para siswa GHS. Hal tersebut yang menyebabkan DR. R. Soeharto turut aktif dalam organisasi tersebut dan terpilih menjadi pengurus pusat Jong Java.

Munculnya Jong Java menginspirasi dibentuknya organisasi sejenis dari kelompok-kelompok suku lain seperti Jong Sumatra Bond, Pasundan, Jong Ambon, dsb. Semangat dalam organisasi pergerakan dari berbagai suku ini memunculkan ide pembentukan Kongres Pemuda I di Jakarta (1926) yang mendorong lahirnya PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia). PPPI yang memprakasai lahirnya Kongres Pemuda II (1928) di Batavia. Pada Kongres Pemuda II di Jakarta, beliau turut menjadi saksi perjuangan para pemuda dalam mengumandangkan sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928.

### 2. Masa Penjajahan Jepang

Pada tahun 1942 merupakan awal pertemuan DR. R. Soeharto dan Soekarno yang menempatkan DR. R. Soeharto menjadi dokter pribadi sekaligus sahabat dekat Soekarno. DR. R. Soeharto banyak mengenal tokoh-tokoh pendiri bangsa, salah satunya M. Hatta. Pada saat itu, M. Hatta memimpin kantor Somobu (Departemen Dalam Negeri dalam masa pemerintahan Jepang) yang kemudian memberikan tugas kepada DR. R. Soeharto untuk:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan bagi pegawai Pamong Praja
- b. Mengelola poliklinik di Prapatan Gambir khususnya untuk melayani kesehatan tukang becak yang jumlahnya kurang lebih 6000 orang
- c. Ditugaskan sebagai Kepala Bagian Kesehatan Pusat Tenaga Rakyat (Putera) di bawah pimpinan Soekarno, M. Hatta, Kyai Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara

Pada tanggal 9 sampai dengan 14 Agustus 1945, DR. R. Soeharto menyertai Soekarno, M. Hatta, dan KRT Radjiman ke Dallat, sebuah kota di pegunungan Indocina untuk menemui Marsekal Terauchi. Dalam pertemuan itu Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia dengan membentuk sebuah badan yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh Soekarno (Ketua) dan M. Hatta (Wakil Ketua). Pada perjalanan tersebut, secara khusus Soekarno meminta DR. R. Soeharto untuk memperhatikan KRT Radjiman Wediodiningrat yang pada saat itu sedang kumat rheumatiknya dan membantunya dalam mengenakan busana adat Jawa

### 3. Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan

- a. Memastikan kesehatan Soekarno Jelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945
  - 1) Sepulangnya Soekarno dari Rengasdengklok (sehari sebelum proklamasi), Soekarno mengalami demam tinggi. Di saat tersebut, DR. R. Soeharto mengunjungi rumah Soekarno dan memeriksa keadaannya.
  - 2) DR. R. Soeharto melakukan observasi terhadap kondisi badan Soekarno. Setelah dicek nadi, pernafasan, dll. DR. R. Soeharto menyimpulkan bahwa Soekarno menderita sakit malaria. Kemudian DR. R. Soeharto memberikan suntikan dan obat kepada Soekarno. Setelah itu, keadaannya berangsur-angsur membaik.
  - 3) 17 Agustus 1945 pukul 09.30 Soekarno terbangun dari tidurnya setelah mendapatkan perawatan dari DR. R. Soeharto. Pukul 10.00 di Jl. Pegangsaan Timur No.56, Soekarno dan M. Hatta mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
- b. Memfasilitasi pertemuan antara Soekarno dan Tan Malaka
  - 1) Pada masa penjajahan Jepang, gerak-gerik Soekarno selalu dipantau oleh militer Jepang, Soekarno mengusulkan untuk diadakan pertemuan dengan Tan Malaka. Pada masa yang sulit saat itu, Soekarno mengarahkan untuk pertemuannya dengan Tan Malaka dirahasiakan dan dilakukan di tempat yang aman dari intaian militer Jepang. Salah satunya di rumah DR. R. Soeharto. Pada tanggal 9 September 1945 di hari pertama Hari Raya Idul Fitri, pertemuan antara Soekarno dan Tan Malaka digelar secara rahasia di kediaman DR. R. Soeharto di Jl. Kramat Raya No. 128.
  - 2) Pertemuan Soekarno dan Tan Malaka di rumah DR. R. Soeharto dilakukan dalam kondisi gelap. Lampu penerangan di kamar pertemuan sengaja dipadamkan untuk menghindari mata-mata Jepang.

- 3) Soekarno sangat mengagumi Tan Malaka dengan semangat perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan di negaranya. Di akhir pertemuan, Soekarno memberi penghormatan kepada Tan Malaka yaitu jika Soekarno tidak berdaya lagi, maka kepemimpinan revolusi akan diserahkan kepada Tan Malaka.
- 4) Pernyataan Soekarno tersebut dituangkan ke dalam surat wasiat Presiden Soekarno untuk Tan Malaka yang disebut Testamen Politik untuk Tan Malaka yang berisi penyerahan kekuasaan pemerintahan Soekarno dan M. Hatta kepada Tan Malaka.
- 5) Ketika surat wasiat tersebut masuk ke M. Hatta untuk ditandatangani, M. Hatta menolak usulan tersebut dan meminta kepada Soekarno untuk diganti karena tidak sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.
- 6) Kemudian pada 1 Oktober 1945, surat wasiat yang sudah diperbarui diketik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta yang berisi penyerahan kekuasaan pemerintahan akan diteruskan oleh saudara-saudara: Tan Malaka, Iwa Kusuma Sumantri, Sjahrir, dan Wongsonegoro.

#### 4. Bendahara/Wakil Ketua/Ketua Fonds Kemerdekaan Indonesia (FKI)

M. Hatta menunjuk DR. R. Soeharto sebagai Ketua/Wakil Ketua Fonds Kemerdekaan yang bertujuan mengumpulkan, menyimpan, dan memberi uang untuk kepentingan perjuangan bangsa Indonesia. Fonds Kemerdekaan awalnya bernama Fonds Perang dan Kemerdekaan, yang dibentuk 1 Februari 1945. Setelah Jepang menyerah pada sekutu 15 Agustus 1945, Fonds Perang dibubarkan dan diganti nama oleh Soekarno menjadi Fonds Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. FKI turut mendukung prajurit TNI dan laskar dalam melawan Belanda pada Agresi Militer I (21 Juli 1947) dengan melakukan penggalangan dana dari masyarakat secara terbuka mulai tanggal 24 Juli 1947.

Pada 18 Mei 1948 di Yogyakarta, dilakukan konferensi antara pengurus Fonds Kemerdekaan Pusat dengan cabang-cabangnya. Dalam konferensi tersebut disepakati untuk membubarkan Fonds Kemerdekaan dan membentuk lembaga baru bernama Fonds Nasional Indonesia. Fonds Nasional Indonesia mulai bekerja pada 20 Mei 1948 bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional. FNI berkantor di Jl. Gondoman No 43, Yogyakarta. Keuangan Fonds Nasional digunakan untuk:

- a. Membantu usaha-usaha nyata dari pergerakan nasional yang kekurangan biaya
- b. Membantu usaha-usaha yang menambah pengetahuan umum dan kecerdasan rakyat
- c. Membiayai pelajar-pelajar sekolah menengah keatas baik di dalam maupun di luar negeri
- d. Mengusahakan bantuan penghargaan kepada yang berjasa dalam pergerakan nasional
- e. Memajukan usaha-usaha di bidang sosial-ekonomi dan kebudayaan nasional Indonesia

Pengurus Fonds Indonesia terdiri dari M. Hatta sebagai Ketua Kehormatan, Mr. Sumanang (Ketua), Notohamiprodo (Wakil Ketua I), KRT Honggowongso (Wakil Ketua II). Pada kepengurusan tersebut tidak ada nama DR. R. Soeharto karena pada saat itu beliau sedang sakit dan menjalani perawatan di RS CBZ Jakarta. Salah satu latar belakang perubahan Fonds Kemerdekaan menjadi Fonds Nasional Indonesia disertai pergantian pengurusnya adalah karena sakitnya DR. R. Soeharto yang pada saat itu menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua.

#### 5. Mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI)

Pemerintah menunjuk R.M. Margono Djojohadikoesoemo untuk mempersiapkan pembentukan Bank Negara Indonesia. R.M. Margono membentuk Yayasan Pusat Bank Indonesia (PBI) pada 9 Oktober 1945 yang bertujuan untuk memusatkan pimpinan dan menyatukan koordinasi di lapangan terkait perekonomian, peredaran modal, serta memberi kesempatan pada masyarakat untuk menukarkan uang asing dengan uang yang berlaku di Indonesia. Pengurus PBI adalah M. Hatta, DR. R. Soeharto, dr. Moewardi, dan lainnya. Pada tahun 1946, dalam proses pembangunan BNI membutuhkan modal yang cukup banyak. Pada saat itu, DR. R. Soeharto memberikan uang dari Fonds Kemerdekaan sebesar Rp 350.000 untuk modal awal pembangunan BNI. Kemudian pada 5 Juli 1946, BNI resmi lahir sebagai bank pertama milik Indonesia. Pada 17 Agustus 1946, dibuka secara resmi Bank Negara Indonesia di Yogyakarta oleh M. Hatta. Bertepatan dengan peresmian BNI, pada saat itu semua cabang-cabang PBI dilebur kedalam BNI.

#### 6. Kepala Jawatan Administrasi Militer Pusat (AMP) Kementerian Pertahanan

Dengan adanya penyerangan terus menerus dari pasukan NICA di Jakarta yang dimulai pada akhir tahun 1945, menyebabkan pindahnya ibu kota ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Saat perpindahan ke Yogyakarta, DR. R. Soeharto turut mendampingi Presiden dan Wakil Presiden sebagai dokter Kepresidenan. Pada Mei 1947, M. Hatta memanggil DR. R. Soeharto dan menugaskannya di Kementerian Pertahanan untuk menyelenggarakan urusan keuangan. Pengalamannya di FKI sangat membantu beliau dalam menjalankan tugas di Kementerian Pertahanan. DR. R. Soeharto ditunjuk sebagai Kepala Bagian Administrasi Militer Pusat (AMP).

Tugas penting DR. R. Soeharto sebagai Kepala Jawatan AMP adalah membenahi administrasi keuangan dan keorganisasian lembaga tersebut. Pada saat menjabat sebagai Kepala AMP dengan beban kerja yang semakin tinggi, pada akhir tahun 1947 DR. R. Soeharto jatuh sakit. Beliau mengalami stroke. Awal 1948, beliau dirawat di RS CBZ Jakarta. Sejak saat itu beliau mengajukan surat permohonan berhenti dan diberhentikan secara terhormat oleh Presiden Soekarno.

DR. R. Soeharto memelopori pembentukan Jawatan KUAD (Keuangan Angkatan Darat). Beliau mendapat penghargaan pada 27 Oktober 1959 dari Inspektur Keuangan Angkatan Darat Letnan Kolonel CKU Buang Siswodarsono. DR. R. Soeharto juga mendapatkan penghargaan atas tenaga dan pikiran yang dicurukannya dalam menentukan Hari Keuangan Angkatan Darat dari lembaga yang sama pada 27 Oktober 1959. Pada tahun 1957, DR. R. Soeharto kembali berkiprah di lingkungan militer dengan menjadi Anggota Pengurus Front Nasional Pembebasan Irian Barat, Urusan Cendekiawan dengan pangkat Kolonel.

Empat tahun kemudian, berdasarkan Keppres RI No. 137/M/Tahun 1961 tanggal 14 Maret, pangkat militer DR. R. Soeharto dinaikan menjadi Brigadir Jenderal Kehormatan. Pada 1 Juli 1964 berdasarkan Keppres RI No. 144/AB-AD Tahun 1964, DR. R. Soeharto oleh Presiden Soekarno diberi pangkat militer kehormatan Mayor Jenderal Kehormatan. Gelar Kehormatan Divisi Siliwangi diberikan oleh Mayjen A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai panglima. Beliau juga mendapatkan cincin Siliwangi yang dianugerahkan oleh Mayjen Ibrahim Adjie.

#### 7. Mendirikan Universitas Gadjah Mada (UGM)

Setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, pada akhir tahun itu banyak kaum terpelajar Indonesia yang pindah ke Yogyakarta karena keadaan yang tidak kondusif di Jakarta. Pada 24 Januari 1946, DR. R. Soeharto menghadiri pertemuan tokoh-tokoh masyarakat (berjumlah 32 orang) di SMT Kotabaru. Kehadiran DR. R. Soeharto tidak atas perintah atau instruksi Presiden Sukarno dan Wapres M. Hatta. Hal tersebut memunculkan gagasan dari Mr. Budiarto, Ir. Marsito, Mr. Soenarjo, dan Dr. Prijono untuk membentuk sebuah yayasan pendidikan di Yogyakarta. Setelah berbagai diskusi dan rancangan yang dilakukan oleh beberapa tokoh, terbentuklah Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Dr. R. Soeharto diundang oleh Mr. Boediarto dalam kapasitasnya sebagai orang penting yang menguasai masalah pendanaan, dan oleh karena itu sangat dibutuhkan dalam yayasan yang kemudian dibentuk untuk mewadahi Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada.

Pembentukan lembaga pendidikan tinggi ini dipandang oleh para tokoh itu sangat penting untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan kompeten yang sangat dibutuhkan oleh RI pada saat itu. Dalam pertemuan itu kemudian disepakati untuk membentuk sebuah yayasan sebagai penyelenggara Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Sebagai ketua yayasan terpilih Mr. Boediarto, lalu Prof. Ir. Roseno sebagai wakil ketua, dan Dr. R. Soeharto sebagai bendahara. Pada perkembangannya lembaga pendidikan ini kemudian dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Pada 19 Desember 1949, Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang meleburkan diri menjadi Universitas Negeri Gadjah Mada. Keikutsertaan DR. R. Soeharto dalam pendirian UGM ini memberikan dampak yang signifikan dan berlangsung sampai saat ini. Sejak lulusan pertama sampai saat ini, alumni UGM berkontribusi penting dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Bahkan Ir. Joko Widodo, merupakan salah satu alumni terbaik UGM yang menjadi presiden RI saat ini.

#### 8. Keikutsertaan dalam Menyelamatkan Bendera Pusaka Merah Putih

Pada 19 Desember 1948, terjadi Agresi Militer II yang menyerang beberapa daerah di Indonesia terutama Ibu Kota Yogyakarta yang akan direbut oleh Belanda. Hal tersebut menyebabkan beberapa tokoh diasingkan ke



beberapa tempat di pelosok Indonesia, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta. Presiden Soekarno mengamanahkan kepada ajudannya (Mutahar) untuk menyelamatkan bendera pusaka merah putih. Untuk menghilangkan kecurigaan prajurit Belanda, Mutahar melepas jahitan bendera sehingga bendera merah putih terbagi menjadi dua bagian, merah dan putih. Mutahar mengamankan bendera tersebut ke Jakarta dan menitipkannya ke DR. R. Soeharto. Bendera merah putih disimpan oleh DR. R. Soeharto di dalam kotak kayu yang ditelakkan di atas lemari rumahnya. Setelah mengetahui kabar para tokoh yang diasingkan akan kembali ke Yogyakarta (5 Juli 1949), Mutahar mengambil kembali bendera di kediaman DR. R. Soeharto dan menjahit bendera tersebut. Pada 6 Juli 1949, Presiden dan Wakil Presiden tiba di istana negara di Yogyakarta dan disusul dengan kedatangan Mutahar dengan membawa bendera merah putih.

#### 9. Pendirian Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

DR. R. Soeharto adalah salah satu orang yang memprakarsai berdirinya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pembentukan IDI tidak lepas dari profesi dokter yang disandang oleh beliau, sehingga dapat dikatakan, tidak ada campur tangan dari Presiden Sukarno dan Wapres M. Hatta. Pada awalnya perkumpulan dokter di Indonesia bernama Vereebuing van Indonesische Geneesheeren (VIG) dan pada masa Jepang diwajibkan berganti menjadi Ish Hooko Kai (IHK). Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, perkumpulan nama tersebut berubah menjadi Perkumpulan Thabib Indonesia (Pertabin) dengan ketua umumnya dr. Rasjid yang juga merupakan mantan anggota VIG dan IHK. Anggota Pertabin terdiri dari artsen dan Indische artsen. Namun beberapa artsen muda yang ada di Jakarta mendirikan perkumpulan sendiri bernama Perkumpulan Dokter Indonesia (PDI) dengan ketua umumnya dr. Darmawansetiawan yang merupakan mantan Dokter KNIL, Sekjen Departemen Luar Negeri, dan Menteri Kesehatan.

Keprihatinan DR. R. Soeharto yang melihat adanya perpecahan organisasi profesi dokter pada saat itu (PDI dan Perthabin) ditengah-tengah kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan para dokter, tentu merupakan sebuah hal yang kontraproduktif. Oleh karena itu beberapa tokoh, termasuk DR. R. Soeharto, mengupayakan untuk menyatukannya dengan menyelenggarakan muktamar. Bahkan sebelum muktamar, DR. R. Soeharto menyelenggarakan diskusi antara 2 organisasi itu di rumahnya Jl. Kramat Raya 128. Muktamar inilah yang kemudian melahirkan IDI pada 24 Oktober 1950 dengan ketua pertamanya Prof. dr. Suwarno Prawirohardjo. Kata "Ikatan" yang digunakan nama organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia merupakan gagasan genuine dari DR. R. Soeharto.

Ketika DR. R. Soeharto menjadi ketua IDI, Dr. Tan Eng Tie ditugaskan membeli gedung IDI (sekarang) di Jalan Sam Ratulangi, Jakarta dari seorang warga negara Belanda seharga Rp 300.000. Sejak itulah, PB IDI melayarkan bahtera organisasinya ditempat tersebut. Maka sudah selayaknya jika pada 2022 ini IDI kemudian mengukuhkan nama DR. R. Soeharto menjadi nama gedung kantor PB IDI yaitu "Gedung Dr. R. Soeharto". Keberadaan IDI sejak didirikan sampai saat ini menjadi mitra Kementerian Kesehatan dalam upaya menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Apalagi pada masa Pandemi Covid-19 sekarang ini, para dokter IDI menjadi garda terdepan dalam upaya pengendaliannya. Bahkan sebanyak 751 dokter anggota IDI meninggal dunia karena Covid-19.

#### 10. Pendirian Organisasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

Sama halnya dengan pendirian organisasi profesi IDI, pendirian PKBI yang salah satunya digagas oleh DR. R. Soeharto, merupakan salah satu konsekuensi dari profesinya sebagai dokter dan luasnya pergaulan internasionalnya. Dalam konteks ini adalah DR. R. Soeharto dengan Ny. Dorothy Bush dari International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1957. Perkenalan ini membangkitkan perhatiannya mengenai birth control dalam rangka kesejahteraan ibu dan anak. Melihat pada masa itu tingkat kematian ibu hamil dalam persalinan dan tingkat kematian bayi dan anak sangat tinggi, terutama dalam keluarga yang memiliki banyak anak.

Pertemuan tersebut memprakarsai DR. R. Soeharto untuk mendirikan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di gedung milik IDI, Jl. Sam Ratulangi No. 29, tepatnya pada tanggal 23 Desember 1957. Pembentukan PKBI ini didasari oleh kekhawatiran DR. R. Soeharto dengan keterbelakangan dan masa bodoh masyarakat terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan anak. Gagasan PKBI difungsikan untuk mengatur kehamilan dalam keluarga dan persalinan serta memberi nasihat perkawinan. Setelah Dekrit Presiden tanggal 10

Juli 1959, DR. R. Soeharto diberi tempat dalam Kabinet Republik Indonesia sehingga kemudian jabatan PKBI diserahkan kepada dr. Ny. H. Soebandrio dan kedudukannya sebagai Ketua Umum IDI diserahkan kepada dr. Pringadi.

Model dan gerakan keluarga berencana yang dilakukan PKBI inilah yang kemudian diadaptasi oleh pemerintah Indonesia dengan mendirikan BKKBN pada tahun 1970. Beberapa program keluarga berencana PKBI kemudian diambilalih oleh BKKBN, dan PKBI kemudian menjadi mitra dari lembaga pemerintah itu. DR. R. Soeharto juga banyak mendapatkan penghargaan dari BKKBN karena jasa-jasanya dalam program KB ini. Keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan jumlah penduduk mendapatkan beberapa penghargaan internasional, salah satunya pada 1989 Presiden Suharto mendapatkan penghargaan United Nations Population Award dari PBB. Penghargaan itu pantas diterima Indonesia karena Indonesia dinilai PBB memiliki gerakan keluarga berencana yang terkuat dan tersukses di dunia. Jumlah pengguna kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) meningkat dua kali lipat hingga mencapai 60% antara tahun 1976 dan 2002. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) berkurang hingga setengahnya, dari 5.6 menjadi 2.6 anak per wanita. Prestasi ini menjadi dasar bagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup stabil, yaitu sebesar 5% per tahun sejak tahun 1980.

#### 11. Pembangunan Proyek Mercusuar dan Vital Masa Presiden Soekarno

- a. Pembangunan Departemen Store Sarinah
  - 1) Pada 10 Juli 1959, DR. R. Soeharto diangkat menjadi Menteri Muda Urusan Perindustrian Rakyat oleh Presiden Soekarno
  - 2) Untuk pembangunan Departemen Store Sarinah, dibentuk perseroan terbatas dimana DR. R. Soeharto sebagai presiden direktur
  - 3) Tujuan didirikannya Departemen Store Sarinah adalah untuk dijadikan pusat sales promotion barang-barang produksi dalam negeri, terutama hasil pertanian dan perindustrian rakyat
  - 4) Pembangunan Sarinah dimulai pada 17 Agustus 1962 dan selesai pada 17 Agustus 1966
  - 5) Sarinah merupakan toserba pertama di Jakarta yang memiliki eskalator dan pendingin udara
  - 6) Pada 23 Agustus 1966, berdasarkan Keputusan Presiden No. 184 Tahun 1966, DR. R. Soeharto tidak lagi menjadi presiden direktur melainkan menjadi wakil komisaris utama PT DSI Sarinah
  - 7) Pada 2 Desember 1966, DR. R. Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil komisaris utama
- b. Pembangunan Monumen Nasional
  - 1) Penunjukkan DR. R. Soeharto sebagai anggota panitia dilaksanakan saat beliau masih menjabat sebagai Menteri Uppenas
  - 2) Pembangunan tugu monas bertujuan untuk menggelorakan semangat yang menciptakan, melukiskan jiwa baru Indonesia serta merupakan simbol dari revolusi Indonesia
  - 3) Pembangunan tugu monas dilaksanakan pada masa Presiden Soekarno dan diselesaikan pada masa pemerintah Orde Baru
- c. Pembangunan Masjid Istiqlal
  - 1) Pada tanggal 17 Agustus 1954 didirikan Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh H. Tjokroaminoto
  - 2) DR. R. Soeharto terlibat dalam dua kali kepanitiaan pembangunan Masjid Istiqlal, yaitu pembangunan Masjid Istiqlal II pada 8 April 1961 sebagai anggota panitia dalam kedudukannya sebagai Menteri Perindustrian Rakyat Kabinet Kerja
  - 3) Keterlibatan kedua DR. R. Soeharto dalam pembangunan Masjid Istiqlal III PADA 13 April 1966, dalam panitia ini DR. R. Soeharto menjadi anggota panitia dalam kedudukannya sebagai Menteri Urusan Pembangunan Nasional (Uppenas)

#### 12. Pendirian Rumah Sakit Jakarta

R. Aris Moenandar (pegawai tinggi Kementerian Sosial), dr. Aloysius Willebrordus (Yayasan Dana Kemensos RI), dan DR. R. Soeharto (Ketua Umum PB IDI dan dokter pribadi Presiden Soekarno), secara khusus meminta izin kepada Presiden Soekarno untuk memberikan tanah bekas International Fair untuk didirikan sebuah rumah sakit umum swasta nasional. Kemudian Presiden Soekarno menyetujui gagasan tersebut. Dua alasan penting yang dikemukakan DR. R. Soeharto kepada Presiden Soekarno yaitu:

- a. Kapasitas RS yang ada di Jakarta pada saat itu belum cukup memadai untuk memfasilitasi kebutuhan dan akses masyarakat

- b. Perlunya dibangun RS yang akan dikelola swasta di Jakarta yang diperuntukan bagi golongan etnis dan agama

Pada 10 November 1953, diadakan rapat pertama di rumah Dr. Seno Sastroarnidjojo (Ketua Perhimpunan Budi Kemulyaan) sekaligus dibentuknya Yayasan Rumah Sakit Jakarta yang bertugas mendirikan dan mengelola RS umum swasta yang bersifat nasional, bukan milik golongan/organisasi tertentu. Sejak adanya SK Gubernur DKI Jakarta No. Cc 1/1/27/70 tanggal 18 Desember 1970, RS Yayasan diganti dengan nama RS Jakarta hingga saat ini.

### 13. Pendirian Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI)

Dalam konteks pendirian PDKI pada 1981, DR. R. Soeharto, bersama para tokoh kedokteran lainnya (15 tokoh), benar-benar didasarkan pada latar belakang keilmuan dan pengalamannya sebagai seorang dokter. Artinya terbebas dari pengaruh Soekarno dan M. Hatta, karena pada saat PDKI didirikan keduanya sudah wafat. DR. R. Soeharto merupakan salah seorang dokter pioner yang bekerja sebagai dokter keluarga. PDKI resmi didirikan pada 20 Desember 1981.

PDKI berkembang dengan pesat, pada 2006 berhasil didirikan Kolegium Ilmu Kedokteran Keluarga (KIKK) dibawah koordinasi IDI dan MKKI. PDKI sendiri saat ini telah menjadi Perhimpunan Dokter Spesialis Dokter Keluarga Layanan Primer. Salah satu milestone tertinggi PDKI adalah disahkannya standar pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer pada tahun 2019. Dalam sistem pembiayaan JKN, layanan primer menjadi sangat penting karena pasien tidak bisa langsung mendapatkan layanan dari rumah sakit, melainkan harus melalui layanan primer seperti di pusat kesehatan masyarakat dan klinik. Sampai tahun 2021 sudah dibuka dua Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, masing-masing di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM dan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

## C. SUMBER DATA

Kementerian Sosial RI.

## 2. Almarhum KGPAA Paku Alam VIII



### A. RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap	: KGPAA Paku Alam VIII
Orang tua	
- Ayah	: Ayah: KGPAA Paku Alam VII Ibu:
- Ibu	: Gusti Raden Ayu Retno Puwoso (Putri Paku Buwono X)
Jabatan	: PAA Prabu Suryodilogo KGPAA Paku Alam VIII
Tempat, tanggal lahir	: Yogyakarta, 10 April 1910
Wafat	: 20 Mei 1998
Tempat Pemakaman	: Astana Girigondo, Kulonprogo
Status Pernikahan	: Menikah
Istri	: 1. KRAy. Ratnaningrum 2. KRAy. Purnamaningrum
Anak Isteri Pertama	: 1. Ir. KPH. H. Probokusumo 2. BRAy. Retno Sundari 3. BRAy. Retno Sewayani 4. KPH. Anglingkusumo 5. KPH. Songkokusumo 6. BRAy. Retno Pudjawati (wafat ketika bayi) 7. KPH. Ndoyokusumo, KPH. Wijoyokusumo
Anak Isteri Pertama	: 1. KPH. Ambarkusumo 2. BRAy. Retno Martani 3. KPH. Gondhokusum 4. BRAy. Retno Suskamdani 5. BRAy, Retno Rukmini 6. KPH. H. Tjondrokusumo 7. BRAy. Hj. Retno Widanarni 8. KPH. Indrokusumo

## B. RIWAYAT PERJUANGAN

### 1. Zaman Kekuasaan Jepang

Di zaman kekuasaan Jepang, HB IX dan PA VIII merasa adanya upaya yang sangat kuat melakukan profokasi dan adu domba antara dua penguasa ini. Hal ini sengaja dilakukan agar Jepang dapat dengan mudah menguasai Yogyakarta, terutama yg sangat dirasakan oleh Jepang adalah sulitnya memperoleh dukungan rakyat apabila tidak menguasai kedua Raja tersebut. Karena alasan tersebut, keduanya harus dipecah dan dibuat agar rakyatnya bermusuhan. Menyadari hal ini Paku Alam VIII menemui Hamengku Buwono IX mohon agar diizinkan untuk berkantor di Kepatihan bergabung dengan kantor yang digunakan Hamengku Buwono IX beraktifitas sehari hari.

Hal ini dilakukan oleh Paku Alam VIII dengan maksud agar ia dapat menghadapi Jepang secara bersama-sama dengan Hamengku Buwono IX dan memberi kesan kepada Jepang bahwa antara keduanya Jepang tidak bisa berbuat seenaknya di Yogyakarta. Misalkan dalam bentuk kerja paksa (romusha) rakyat Yogyakarta dapat diselamatkan karena pesan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam XIII. Setelah kekalahan Jepang oleh Sekutu, Hamengku Buwono IX dan Paku Alam XIII bertekad melucuti senjata tentara Jepang dengan paksa. Yang kemudian berakhir dengan pertempuran di Kota Baru Yogyakarta pada 6 Oktober 1945 dengan menyerahnya tentara Jepang dan seluruh perseniataannya diserahkan kepada para pejuang yang kemudian menjadi cikal bakal dibentuknya Divisi Istimewa TKR dibawah Kolonel Sudarsono.

### 2. Revolusi Fisik 1945-1949

Proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur No 56, Cikini, Jakarta. Pada saat itu Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII dan KRT Honggo Warso mendengarnya secara bersamaan, dan segera setelahnya tanggal 18 Agustus 1945 secara pribadi Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengirim telegram ke Jakarta menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Kedipaten Paku Alaman menjadi bagian wilayah Republik Indonesia.

- a. Tanggal 19 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan Piagam Kedudukan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dalam Republik Indonesia.
- b. Selanjutnya disusul amanat Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII secara terpisah mengingatkan bahwa kedua Kerajaan tersebut merupakan Kerajaan yang bertanggung jawab kepada Presiden RI pada tanggal 5 September 1945.
- c. Pada tanggal 30 September 1945 Hamengku Buwono XI dan Paku Alam VIII terbit amanat Hamengku Bowono IX dan Paku Alam VIII yang ditanda tangani secara bersama-sama tentang status dan kedudukan kedua Kerajaan tersebut secara resmi dalam negara Republik Indonesia.
- d. Telegram tanggal 18 Agustus 1945, Hamengku Buwono XI dan Paku Alam VIII tentang pernyataannya mendukung dan bergabung dengan Republik Indonesia pada dasarnya disebut sebagai pernyataan pribadi dan ini sangat penting artinya karena dianggap sebagai langkah awal keterlibatan keduanya dalam draft perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini disebut sebagai sebuah pengkhianatan yang sangat berani oleh keduanya karena dengan pernyataan itu keduanya telah melakukan pelanggaran besar atas kontrak dan perjanjian kesetiiaannya kepada Kerajaan Belanda.
- e. Waktu berjalan sangat cepat. Negara yang baru diproklamirkan kemerdekaannya itu perlu dilindungi eksistensinya. Pada tanggal 12 November 1945, tiga bulan setelahnya, diadakanlah konferensi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) untuk segera menyusun struktur organisasi ketentaraan yang akan menjadi kekuatan utama penjaga kedaulatan Negara. TKR inilah yang kemudian menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) yang kemudian melalui ketetapan no 24 tahun 1947 menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia).
- f. Konferensi TKR (12 Nov 1945) yang berlangsung di Yogyakarta ini menghasilkan colonel Soedirman menjadi Panglima TKR yang kemudian dikenal dengan nama Jenderal Soedirman, dan Letjen Urip Soemohardjo sebagai Kepala Staff Umum, serta Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Keamanan.
- g. Perlu digarisbawahi bahwa keberlangsungan konferensi yang sangat penting ini terlaksana dengan baik atas kontribusi yang sangat besar dari Paku Alam VIII dengan menanggung seluruh akomodasi, keperluan konferensi dan konsumsi.
- h. Paku Alam VIII juga memberikan rumah jabatan kepada Panglima TRI Jenderal Soedirman dan kepada Letjen Urip Soemohardjo, serta perumahan-perumahan untuk para perwira TKR yang bertugas di

Jogyakarta. Semua fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma itu adalah milik pribadinya dan milik Puro Paku Alaman.

Pada tanggal 27-29 Desember 1945 Pasukan NICA yang membonceng dibelakang tentara Sekutu melakukan operasi militer di Jakarta. Situasi ini menjadikan Jakarta sebagai tempat yg tidak aman.

- a. Terjadi pencegatan terhadap mobil Perdana Menteri Sutan Syahrir yang diperlakukan sangat kasar oleh tentara NICA.
- b. Terjadi penembakan terhadap mobil Menteri Keamanan Rakyat Mr. Amir Syarifoeuddin.
- c. Terjadi penembakan terhadap mobil Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Mr. Moh. Roem hingga mengenai pahanya.

Atas alasan keamanan ibu kota Negara RI yang tidak stabil tersebut, maka dipikirkan untuk segera mencari kota lain yang akan dijadikan sebagai ibu kota sementara negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 2 Januari 1946, melalui kurir Hamengku Buwono IX mengirim surat kepada Presiden Soekarno yang isinya menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota RI sementara dengan disertai jaminan keamanan. Tawaran tersebut diterima dan disambut baik oleh Presiden Soekarno. Mengingat adanya jaminan keamanan dan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yg dimiliki Yogyakarta untuk dijadikan ibu kota sementara RI, maka pada tanggal 3 Januari 1946 segera diadakan rapat persiapan pemindahan ibu kota ke Yogyakarta.

Tanggal 4 Januari 1946, rombongan Presiden RI dan wakil Presiden RI serta para Menteri tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta. Disambut langsung oleh Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII, dan Jenderal Sudirman. Selanjutnya selama 7 minggu Presiden dan Wakil beserta keluarganya tinggal di Puro Pakualaman dengan seluruh keperluannya berada dibawah tanggungan Paku Alam VIII (Puro Pakualaman). Demikian pula seluruh fasilitas kenegaraan yang melibatkan Presiden dan Wakil Presiden dalam kegiatan kenegaraan sehari-hari berada dibawah tanggungan Paku Alam VIII Demikian juga dengan pembiayaan pemerintahan dan gaji para Menteri dan pejabat pemerintah pusat selama Ibu Kota Sementara berkedudukan di Yogyakarta dari tanggal 4 Januari 1946.

Tanggal 29 oktober 1947 dilakukan sidang KTN di Yogyakarta. Sidang ini sangat penting artinya untuk memperkokoh kedaulatan RI di mata dunia Internasional. Ide untuk melaksanakan perundingan KTN di Kaliurang sepenuhnya berasal dari Paku Alam VIII dan bahkan seluruh keperluan dan fasilitas penyelenggaraan Perundingan KTN dibiayai oleh Paku Alam VIII, demikian juga penggunaan fasilitas milik Hamengku Buwono IX seluruhnya digunakan atas izin Hamengku Buwono IX.

Sebagai tindak lanjut dari perundingan KTN di Kaliurang, dilanjutkan dengan perundingan diatas kapal perang Amerika Renville (8 Desember 1947 - 17 Januari 1948). Salah satu dampak dari perundingan Renville adalah militer RI harus mengosongkan kantong-kantong gerilya dan diharuskan pindah ke wilayah RI. Akibatnya, pasukan-pasukan Siliwangi harus hijrah ke wilayah RI. Masalah ini bukan persoalan kecil karena jumlahnya sangat banyak dan tentu akan menimbulkan persoalan dengan penduduk setempat. Menanggapi hal tersebut, lagi-lagi Paku Alam VIII turun tangan langsung menjemput pasukan-pasukan Siliwangi dengan menyambutnya di stasiun Tugu dan memberi mereka pemondokan dan makanan selama mereka di berada di Yogyakarta.

Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 1947, PBB membentuk sebuah komisi yang secara langsung turut campur menyelesaikan pertikaian Indonesia – Belanda dengan nama KTN (Komisi Tiga Negara) yang terdiri atas Australia diajukan oleh Indonesia, Belgia diajukan oleh Belanda, dan Amerika yang dipilih oleh Australia. Tanggal 29 oktober 1947 dilakukan sidang KTN di Yogyakarta. Sidang ini sangat penting artinya untuk memperkokoh kedaulatan RI di mata dunia Internasional. Ide untuk melaksanakan perundingan KTN di Kaliurang sepenuhnya berasal dari Paku Alam VIII dan bahkan seluruh keperluan dan fasilitas penyelenggaraan Perundingan KTN dibiayai oleh Paku Alam VIII, demikian juga penggunaan fasilitas milik Hamengku Buwono IX seluruhnya digunakan atas izin Hamengku Buwono IX.

Sebagai tindak lanjut dari perundingan KTN di Kaliurang, dilanjutkan dengan perundingan diatas kapal perang Amerika Renville (8 Desember 1947 - 17 Januari 1948). Salah satu dampak dari perundingan Renville adalah militer RI harus mengosongkan kantong-kantong gerilya dan diharuskan pindah ke wilayah RI. Akibatnya, pasukan-pasukan Siliwangi harus hijrah ke wilayah RI. Masalah ini bukan persoalan kecil karena jumlahnya sangat banyak dan tentu akan menimbulkan persoalan dengan penduduk setempat.

Menanggapi hal tersebut, lagi-lagi Paku Alam VIII turun tangan langsung menjemput pasukan-pasukan Siliwagi dengan menyambutnya di stasiun Tugu dan memberi mereka pemondokan dan makanan selama mereka di berada di daerah istimewa Yogyakarta.

Ketika terjadi peristiwa Pemberontakan PKI di Madiun Rakyat Yogyakarta selamat dari pergolakan itu berkat peran penting Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII yang turun langsung melindungi rakyatnya dari berbagai profokasi PKI.

Pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi Agresi Militer II yang mengakibatkan tertangkapnya seluruh pimpinan pemerintahan. Ibu Kota pemerintahan pindah ke Bukit Tinggi dibawah PDRI yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara. Pemerintahan dikembalikan lagi ke Yogyakarta pada 6 Desember 1949, baru kemudian pada 17 Agustus 1950 dari Yogyakarta dikembalikan ke Jakarta.

Setelah dibubarkannya RIS dan kembali ke NKRI, selama priode tersebut pembiayaan Negara diambil dari sumbangan Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Jumlahnya sumbangan tersebut sekitar 6 juta Gulden. Keputusan untuk menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota RI Sementara merupakan sebuah keputusan yang tepat, berani, cerdas, dan sangat strategis. Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII telah menempatkan Yogyakarta sebagai jantung perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

### C. RIWAYAT JABATAN

1. Tahun 1966 sebagai Ketua delegasi Indonesia ke Asean Games III di Bangkok
2. Tahun 1964 sebagai Anggota Bappenas
3. Tahun 1963 sebagai Ketua Palang Merah Indonesia
4. Tahun 1960 sebagai Anggota MPRS
5. Tahun 1956 sebagai Anggota Konsituante RI
6. Tahun 1955 sebagai Ketua Panitia Nasional pemilu
7. Tahun 1951 sebagai Ketua Delegasi Indonesia ke Asean Games di New Delhi, India

### D. PENGHARGAAN

1. Bintang Mahaputra Pratama kelas IV (Tahun 1962)
2. Bintang Mahaputra Utama kelas III (Tahun 1967)
3. Bintang Gerilya
4. Bintang Bhayangkara Kelas III
5. *Grotes Verdienst Krouz mit Stren*
6. Bintang *Groot Ere Kruis Met Plaque in de Kroonorde*
7. Bintang *Grootofficier in de Orde van Leopold II*
8. Anugerah Manggala Karya Kencana (Tahun 1989)
9. Satyalencana Pembangunan (Tahun 1994)

### E. SUMBER DATA

Kementerian Sosial RI.

### 3. Almarhum Dokter Raden Rubini Natawisastra



#### A. RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap	: H. Usmar Ismail
Orang tua	
- Ayah	: Haji Ismail Datuk Manggung
- Ibu	: Fatimah Zahra
Jabatan	: Dokter, Kepala RSUD Sungai Jawi, Pontianak, 1936-1942
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, Jawa Barat, 31 Agustus 1906
Wafat	: Mandor, 28 Juni 1943 (36 tahun)
Tempat Pemakaman	: Makam Juang Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat
Status Pernikahan	: Menikah
Istri	: Amaliah Rubini
Anak	: 1. Ni Raden Rubinetta Rubini 2. Ni Raden Aminetti Rubini 3. Ni Raden Marlina Rubini 4. Ni Raden Maryetti Rubini 5. Ni Raden Siti Martini Rubini
Pendidikan	: 1. Hollandsch Inlandsch School, (HIS) Bandung, lulus 1919 2. School Tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA), 1920-1930

Raden Rubini Natawisastra menerima pendidikan formal pertamanya di Hollandsch Inlandsche School (HIS) di Bandung dan lulus pada tahun 1919. Beliau terlahir di tengah keluarga berpendidikan karena ayahnya seorang Mantri Guru di Normalschool Bandung. Oleh sebab itu pendidikan dipandang hal yang penting di dalam keluarga. Sejak muda, Rubini ingin menjadi dokter, selain karena saat itu dipandang sebagai pekerjaan yang terpendang (baik), ia juga ingin menolong orang yang sakit karena saat itu akses kesehatan cukup sulit didapatkan (Wiyogo, 2022). Akhirnya ia mendaftarkan diri di School Tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) di Batavia dan resmi diterima pada tahun 1920.

Selama tiga tahun pertama ia belajar di bagian persiapan, setelah berhasil lulus dengan baik barulah ia belajar di bagian kedokteran selama 7 tahun (lulus 1930) (Mulder, 1930).



## B. RIWAYAT PERJUANGAN

1. Rubini mengenyam pendidikan di Sekolah Kedokteran STOVIA di Batavia, resmi diterima sekitar bulan Mei 1920. Selama berkuliah gemar mengikuti kegiatan olahraga, seperti atletik dan tergabung dalam klub sepakbola STOVIA dan klub bola profesional 'Oliveo' (NIVB, 1934). Rubini mengikuti sejumlah kegiatan-kegiatan dan organisasi yang tumbuh dan berkembang di sekitar STOVIA seperti studieclub. Kegiatan itu mendorong tumbuhnya rasa kesadaran kebangsaan. Terlebih rekan-rekan seangkatannya juga merupakan aktivis pergerakan seperti Sarwono Prawirohardjo dan Kroeng Raba Nasution (Zaalberg, 1920). Sarwono pernah menjadi ketua Jong Java, kelak dikenal sebagai bapak kebidanan dan pendiri LIPI (Anonim, 2009). Sedangkan Kroeng Raba Nasution lebih dikenal dengan nama Sutan Muhammad Amin, aktif di Jong Sumatera dan kelak menjadi Gubernur Muda Sumatera 1946-1949 (Tim Museum Sumpah Pemuda, 2020). Rubini diyakini berinteraksi dengan Paguyuban Pasundan (PP), karena organisasi ini didirikan oleh mahasiswa STOVIA dan kaum menak di Batavia (Lubis, 1998).
2. Pada 7 Juli 1930 Rubini telah dinyatakan lulus dan berhak menyandang titel Indische Artsen (Mulder, 1930). Ia kemudian diangkat menjadi dokter pegawai negeri Gouvernement Indisch Arts, dan bekerja di Rumah Sakit Pusat CBZ Batavia. Sejak itu yang sadar akan nilai kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan, memutuskan mengambil jalur kooperatif untuk mencapai tujuan dan menghindari tindakan represif pemerintah kolonial. Bekerja di CBZ dimanfaatkannya untuk menunjang keahlian dan memperdalam ilmu kedokteran. Pada bulan September 1934 ia dipindahkan ke Pontianak (Mulder, 1934).
3. Berdinas di Rumah Sakit Umum Sungai Jawi Pontianak. Menjalankan misi kemanusiaan dengan menjadi dokter keliling melayani pengobatan di daerah terpencil dan pedalaman di Kalimantan Barat. Melayani semua golongan penduduk tanpa membeda-bedakan status dan yang tidak mampu. Berjuang untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan karena persalinan tradisional. Usaha itu dibantu oleh istrinya Nyonya Amalia Rubini yang tergabung dalam gerakan palang merah setempat (Wiyogo, 2022). Untuk itu ia selain membuka praktik dokter, ia juga membuka praktik kebidanan yang ditangani bidan berijazah, di tengah kota agar dapat dijangkau semua kalangan (Gouvernements Bedrijf der Telefonie, 1939). Kedepannya dr. Rubini juga ditugaskan mengepalai bagian bedah dan nantinya diangkat sebagai kepala Rumah Sakit Sungai Jawi (Rahmayani, 2013).
4. Bergabung ke dalam Partai Indonesia Raya (Parindra) Komisariat Daerah Kalimantan Barat untuk sama-sama memperjuangkan kemajuan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1939 masuk dalam susunan kepengurusan Parindra wilayah bersama Raden Mahmud Susilo Suwignyo (Ketua Wilayah), dr. Agusjam, dr. R. Sunaryo, dr. R.M.A. Diponegoro, dr. Ismail, dan Uray Amir Saifuddin (Suwignjo & Mansur, 1972).
5. Rubini bersama pengurus Parindra Kalimantan Barat, mengembangkan kegiatan-kegiatan dan usaha yang dikelola oleh partai seperti media massa, kursus kader politik, grup musik, klub olahraga, koperasi, dan lima unit sekolah desa. Kursus kader Parindra ingin mendoktrin generasi muda yang cinta tanah air dengan materi yang diberikan tentang sejarah pergerakan kebangsaan dan tujuan Parindra. Mendorong terbentuknya klub sepak bola sebagai alat perjuangan karena dapat merekatkan persatuan dan sarana pengumpulan massa (Sembada & Prasetyo, 2020).
6. Memanfaatkan organisasi tandingan bentukan Belanda yakni Persatuan Anak Borneo (PAB) sebagai alat perjuangan pada tahun 1939-1941. Sebagaimana hasil keputusan pengurus Parindra Kalimantan Barat, bahwa partai akan mengirimkan kadernya untuk duduk di dalam kepengurusan PAB secara rahasia. PAB yang awalnya untuk menyaingi Parindra melalui gerakan politik, dibelokkan haluannya ke bidang kebudayaan dan pendidikan (Listiana, 2019). Dengan begitu usaha Belanda untuk memecah pergerakan kebangsaan dapat dikatakan gagal. Persaingan antar kubu politik Parindra dan PAB dapat dihindari. Dalam sebuah resepsi, dr. Rubini menunjukkan dukungannya terhadap R.M Nalaprana (Ketua PAB) yang terpilih sebagai anggota Volksraad (Paath, 1939). Dokter Rubini juga terus menuntut pemerintah kolonial untuk memperhatikan pelayanan kesehatan di Kalimantan Barat yang cukup tertinggal dari wilayah lain (Besnard, 1940).

7. Disela-sela aktivitas politiknya, ia tetap menjalani profesinya sebagai dokter di rumah sakit maupun sebagai dokter keliling. Misalnya, menurut kesaksian seorang Mantri Kesehatan yang bernama Achmad Atmosuwito yang ditempatkan di Sungai Kakap sekitar tahun 1930an-1941. Selama bertugas ia mengenal dr. Rubini sebagai pribadi yang baik dan suka menolong siapa saja serta dekat dengan rakyat. Dokter Rubini datang ke Sungai Kakap secara terjadwal untuk membantu melayani orang-orang yang sakit dan pemeriksaan kesehatan di desa tersebut (S. Santoso, 2022).
8. Ia menolak untuk dievakuasi oleh pemerintah kolonial. Memilih bertugas merawat korban-korban pengeboman pesawat bomber Jepang di Pontianak pada Desember 1941, diantaranya di Rumah Sakit Umum Sungai Jawi. Ketika itu ia baru pulang dari perjalanan darat sejauh 14 jam setelah melakukan pengobatan di pedalaman (Heilbrunn, 1942). Suasana semakin rumit karena dokter-dokter dan tenaga kesehatan telah dievakuasi oleh pemerintah kolonial yang memperparah kurangnya tenaga medis. Pada 23 Desember 1941 dr. Rubini diangkat menjadi perwira kesehatan cadangan berpangkat Letnan II. Kuat dugaan ia bertugas menggantikan pemimpin Rumah Sakit Militer yang ditinggalkan dokter Belanda (dievakuasi) (Booy, 1941).
9. Dengan mengambil strategi untuk berpura-pura kooperatif dengan Jepang sebagai jalan perjuangan, dr. Rubini bersama tokoh-tokoh politik, kaum intelektual, pegawai, dan kalangan kesultanan, membentuk organisasi Nissinkwai pada bulan Mei 1942. Nissinkwai akan digunakan oleh para politik secara diam-diam sebagai sarana perjuangan karena partai politik dan organisasi-organisasi lainnya telah dibubarkan Jepang. Tujuan sebenarnya Nissinkwai ialah untuk terus memupuk dan memelihara semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia (Ahok et al., 1992). Akan tetapi pada bulan Oktober 1942, karena kecurigaan aktivitas para pengurusnya, Jepang membubarkan Nissinkwai. Pengurus kemudian bergabung ke dalam Pemuda Muhammadiyah, dalam selubung kegiatan keagamaan namun tetap bergerak secara bawah tanah untuk menentang Jepang (Staf Semdam XII, 1970).
10. Tekad untuk melawan Jepang semakin kuat selain didorong karena melihat penderitaan rakyat semakin berat, ia juga menyaksikan sendiri bagaimana Jepang memperendah harkat derajat wanita. Banyak terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara mereka. Dokter Rubini kerap merawat kaum perempuan yang menerima kemalangan tersebut baik di rumah sakit maupun rumah praktiknya (Wiyogo, 2022).
11. Pada Januari 1943, dr. Rubini menerima kunjungan dr. Susilo dari Banjarmasin yang memberitakan adanya gerakan untuk melawan Jepang di kota itu dan diharapkan di Pontianak juga diadakan aksi serupa. Hal itu ditindaklanjuti dr. Rubini yang kemudian mulai menggalang massa memimpin gerakan untuk melawan Jepang di Pontianak hal ini diamini oleh Raden Mahmud Susilo Suwignjo yang merupakan Ketua Wilayah Parindra Kalimantan Barat (Suwignjo & Mansur, 1972). Penelitian Karel Juniardi juga menemukan fakta yang sama bahwa dr. Rubini adalah pemimpin gerakan melawan Jepang ketika itu (Juniardi, 2009). Usaha-usaha perlawanan ini coba untuk ditutupi oleh dr. Rubini dengan tetap berpura-pura bekerjasama dengan Jepang. Untuk mengelabui, dr. Rubini bersedia terlibat dalam kepanitiaan sejumlah hari besar Jepang dan kegiatan olahraga bersama tentara Jepang (Paath, 1942).
12. Pada bulan Juni 1943, gerakan bawah tanah yang dipimpin dr. Rubini membentuk pasukan penyerbuan bersenjata yang dinamakan 'Soeka Rela'. Dari hasil-hasil rapat rahasia diputuskan untuk melakukan perlawanan pada 8 Desember 1943 (Gin, 2011). Pada bulan Oktober 1943, Jepang mencium konspirasi perlawanan ini dan mulai melakukan penangkapan besar-besaran terhadap orang yang diduga tergabung dalam gerakan. Penangkapan itu dimulai pada 23 Oktober 1943. Termasuk dr. Rubini dan rekan-rekannya yang lain juga ditangkap lewat jebakan undangan oleh Jepang (Soedarto, 1989). Koran Borneo Sinbun 1 Juli 1944 mengabarkan pada 28 Juni 1944 telah menghukum mati 48 tokoh penting yang dianggap sebagai pemimpin perlawanan terhadap Jepang. Diantara daftar nama tersebut terdapat nama dr. Rubini dan istrinya, Nyonya Amalia Rubini (Koakimoto, 1944). Dokter Rubini dinyatakan gugur pada 28 Juni 1944 dan jasadnya berada di salah satu dari 9 pemakaman massal di Mandor, tempat tentara Jepang melakukan pembantaian terhadap penduduk Kalimantan Barat. Kini telah ditetapkan sebagai Monumen Makam Juang Mandor.

13. Dipadangkannya perlawanan yang dipimpin dr. Rubini dan diikuti dengan aksi-aksi pembunuhan yang dilakukan Jepang, mendorong aksi perlawanan lebih luas yang bermula di Meliau oleh pemimpin Dayak (sub suku Majang Desa) di bawah Pang Suma. Perlawanan pasukan Dayak semakin hebat dengan memasuki kota-kota termasuk Sanggau dan Pontianak setelah mengetahui sejumlah elit politik yang merekai harga seperti sultan dan dokter-dokter (termasuk dr. Rubini) telah dihabisi Jepang (Tanasaldy, 2014).
14. Di sisi lain cita-cita kemerdekaan dr. Rubini dan rekan-rekannya yang gugur, terus diwarisi oleh rekan-rekannya yang menjelma pasca kemerdekaan menjadi gerakan mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, dari dokter yang selamat pada peristiwa 1944 itu, terdapat nama dr. Salekan di Singkawang yang mendirikan laskar perjuangan Badan Pemberontak Indonesia Kalimantan Barat (BPIKB) yang menghimpun pejuang-pejuang republik. Sementara itu dr. Soedarso yang juga selamat, sepanjang revolusi kemerdekaan 1945-1949 hadir sebagai pemimpin kaum republik yang sangat dihormati. Turut membidani lahirnya Pemuda Pejuang Republik Indonesia (PPRI) dan Gabungan Persatuan Indonesia (GAPI) (Soedarto, 1989). Sementara itu dr. Soeharso yang berhasil selamat dan berada di sekitar Surakarta pasca kemerdekaan, mendirikan rumah sakit perawatan untuk korban perang kemerdekaan (Poliman, 1983). Ketiga dokter tersebut merupakan rekan dr. Rubini semasa hidup yang sama-sama ditugaskan di sekitar Kalimantan Barat.

### C. SUMBER DATA

Kementerian Sosial RI.

#### 4. Almarhum Haji Salahuddin Bin Talabuddin



##### A. RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap	: Haji Salahuddin Bin Talabuddin
Orang tua	
- Ayah	: Ayah: Talabuddin bin Salahuddin
- Ibu	: Toloa Hidayat
Tempat, tanggal lahir	: Patani 1887, Tanggal Lahir Tidak Diketahui
Wafat	: 6 Juni 1948
Tempat Pemakaman	: Kota Ternate
Status Pernikahan	: Menikah
Istri	: 1. Mujuna Arfan/Moemina 2. Turifa (Nyangan Dolo-Dolo)
Anak	: Jamaluddin Talabuddin (Din) anak dari Isteri Ke-2, Turifa (Nyangan Dolo-Dolo)

##### B. RIWAYAT HIDUP

1. Tahun 1907 – 1910 Haji Salahuddin Bin Talabuddin, melaksanakan ibadah haji selama tiga tahun untuk mendalami islam. Haji Salahuddin kembali ke tanah air dan menuju ke kampungnya di Gemia, Patani, pada tahun 1911. Selama berada di Patani, pekerjaan sehari-harinya adalah mengajarkan baca-tulis Alquran pada anak-anak.
2. Tahun 1916 Haji Salahuddin Bin Talabuddin pindah ke Salawati, Raja Ampat dan menikah dengan anak Raja Ampat dan berdakwah. Haji Salahuddin Bin Talabuddin mengajarkan barazanji, saraffal anam, menyatukan umat islam untuk menentang penjajahan. Aktifitasnya tersebut tidak disukai oleh Polisi Belanda di Salawati. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa selama di Mekkah, Haji Salahuddin Bin Talabuddin berkawan dengan seorang yang bernama Imam Nuruddin Al Kadari, keturunan Sayyid Makdani Abd. Kadir, dari Sumber yang ditemukan dalam Laporan Rahasia Pemerintah disebut (GEHEUM REPORT) bahwa ajaran yang diamalkan Haji Salahuddin berasal dari Turki.
3. Tahun 1918 – 1923 Raja Ampat dilanda penyakit Beri-beri (hepatitis). Samari, anak angkatnya, meninggal karena hanya diobati dengan pengobatan tradisional dan Haji Salahuddin didakwa membunuh anaknya dengan

membiarkan mati tanpa pengobatan (vaksin). Atas tuduhan pembunuhan itu, ia dijatuhi hukuman pembuangan sebagai akal bulus pemerintah kolonial untuk menghentikan aktivitas Pengajian dan dakwah anti Belanda yang dijalankan sejak tahun 1918. Haji Salahuddin Bin Talabuddin dibuang ke Sawah Lunto dengan tuduhan pembunuhan anak untuk menghentikan gerakan dakwah.

4. Tahun 1925 – 1926, Sepulang dari Sawah Lunto, ia bergabung dalam organisasi Sarekat Islam (S1 - Merah) dan lagi-lagi menjadi Buronan Politik, dan lolos dari penangkapan karena Pemerintahan Belanda menangkap S1 Merah yang dituduh biang dari Pemberontakan PKI. Haji Salahuddin dianggap berbahaya, namun dalam laporan MEMORIES VAN OVERGAVE disebut tidak ada aksi PKI di Weda dan setelah itu Haji Salahuddin Bergabung dengan PSII dan juga duduk sebagai Pengurus GAPI yang bersemboyan Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Cita-cita menuju Indonesia Merdeka. Pemerintah Belanda kemudian melakukan penangkapan besar-besaran terhadap aktivis GAPI dan Haji Salahuddin Lolos dari penangkapan.
5. Tahun 1927 – 1937, Haji Salahuddin bersembunyi dari goa ke goa sambil mendalami Ilmu Tarekat Qadariah. Atas perilakunya itu, ia dianggap gila, akhirnya ia ke Salawati dan kembali membuka pengajian dan melancarkan dakwah serta memperoleh banyak murid dan pengikut dan kembali mengorganisir pengajian dan aktivitas yang bertujuan menantang Pemerintah Kolonial Belanda.
6. Tahun 1937, Melalui organisasi SJII (Syarikat Jamiatul Iman Wal-Islam) yang dibentuknya, ia memompakan perjuangan anti Belanda pada murid dan pengikut-pengikutnya yang ternyata anggotanya bukan hanya orang-orang Islam tapi juga terdiri atas orang-orang Kristen, karena tema utamanya adalah menuju Indonesia Merdeka dan mengusir Belanda, karena itu ia membentuk sayap militer dalam SJII.
7. Tahun 1941 – 1942, Haji Salahuddin Bin Talabuddin bersama dengan 6 orang pengikutnya mengibarkan bendera merah-putih di Tanjung Ngolopopo. Haji Salahuddin dan istri beserta 4 orang pengikutnya ditangkap Pemerintah kolonial. Isterinya dibuang dan dipenjara di Makassar. Haji Salahuddin dibuang di Nusakambangan bersama 2 orang pengikutnya. Dari Nusakambangan, ia dipindahkan ke Boven Digul, sementara kawannya yang lain tetap di Nusakambangan. Di Boven Digul ia bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan politik dan menghabiskan hari-harinya berdiskusi sesama buangan. Hanya saja tidak diperoleh informasi lanjut dengan siapa saja ia bertemu di Boven Digul
8. Tahun 1942 – 1946, Haji Salahuddin Bin Talabuddin kembali ke Gebe, Selama di Gebe ia kembali menggiatkan organisasi SJII dan karena organisasinya bertumbuh besar, ia memindahkan kegiatannya ke Patani; Perjuangan SJII bukan semata-mata perjuangan agama karena keanggotaan SJII, terdapat juga kelompok-kelompok masyarakat/orang-orang yang beragama Kristen. Dengan begitu disimpulkan bahwa SJII adalah organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan. Dalam Dimensi Islam, fatwanya yang utama adalah “Haram hukumnya rakyat bekerjasama dengan Belanda” dan siapa pun yang ketahuan menjadi kaki-tangan Belanda akan diberi hukuman yang setimpal. Di Patani, ia mengobarkan Perjuangan Anti Belanda; dan membentuk Sayap Militer yang dipersenjatai dengan senjata-senjata tradisional, usaha pembuatan senjata tradisional dengan berbagai bentuk diusahakan masyarakat di seluruh daerah Patani untuk mempersiapkan sayap militer SJII. Gerakan ini sangat meresahkan Pemerintah Belanda yang berkuasa kembali selepas Jepang kalah.
9. Tahun 1947, Hampir semua penduduk di Patani siap perang jika Belanda kembali berkuasa, seruan merah-putih menggema di mana-mana. Belanda akhirnya mengirim polisi untuk berpatroli dan meredam gerakan merah-putih di Weda. Haji Salahuddin dituduh menyebarkan aliran sesat, dan akhirnya dikirim patroli polisi untuk meredam Gerakan merah-putih dan kemudian terjadi bentrok beberapa kali antara polisi Belanda dan Pengikut SJII; Pertama 11 orang meninggal, kemudian pada bentrok selanjutnya 30 orang meninggal setelah Belanda menggunakan kapal perang, mengangkut pasukan dan pertempuran diantara keduanya tidak bisa dihindari. Tidak hanya laki-laki yang bertempur menghadapi Belanda, tapi juga kaum perempuan sebanyak 600 orang ikut bertempur berhadapan langsung dalam perkelahian melawan Pasukan Belanda, dan Belanda pun lari ke kapal dan meninggalkan Patani.

10. Tanggal 16 – 17 Februari 1947, Kapal Perang Belanda tiba di Patani dengan membawa tambahan pasukan. Ikut serta Residen Ternate (yang juga Sultan Ternate) Iskandar Muhammad Djabir Syah bersama asissten Residen Ternate Mr De Leeuw bersama pasukan Belanda dengan persenjataan lengkap. Sultan Ternate yang juga sebagai Residen Ternate, menemui langsung Haji Salahuddin dan Haji Salahuddin sangat maklum atas kedatangan Sultan Ternate, seorang Sultan yang sangat dihormatinya dan datang sendiri untuk menemuinya untuk membawa / menjemputnya ke Ternate dengan tangan yang diikat, la pun berteriak “ALLAHU AKBAR! Lanjutkan perjuangan.” la pun segera dibawa ke atas kapal perang sambil berteriak dengan lantang “Hidup Islam, Hidup Sarekat Islam, Hidup Republik Indonesia, Allahu Akbar” Walau demikian la pun tetap tenang dihadapan Sultan Ternate, seorang yang sangat dihormatinya. Namun setelah la naik ke atas kapal, terjadilah perkelahian antara pengikutnya dengan pasukan Belanda. 11 orang meninggal dan puluhan yang luka tembak demikian juga di pihak Belanda
11. Tahun 1947, Setelah itu, Sultan Ternate memerintahkan agar semua senjata tajam diserahkan, setibanya di Ternate, la dijebloskan ke penjara dalam Benteng Orange. Dalam proses pengadilan la menolak untuk diadli karena la menganggap Indonesia sudah merdeka dan yang berhak untuk mengadilinya kalau la melanggar adalah Pengadilan RI. la menolak Pengadilan Belanda karena tidak sah, tapi Pengadilan Tidore yang mengadilinya dengan dakwaan melakukan makar untuk menggulingkan kekuasaan Pemerintah Belanda. la diminta untuk mengajukan banding dan meminta maaf tapi la menolak.
12. 6 Juni Tahun 1948, la pun dijatuhi hukuman mati didepan 12 orang regu tembak, tanpa rasa takut la minta agar matanya tidak ditutup dan tangannya tidak diikat serta berpesan pada regu tembak yang akan mengeksekusinya agar diizinkan takbir untuk sholat sunnah. Setelah la mengangkat tangan untuk takbir, la meminta agar ditembak dan maut pun menjemputnya dengan 12 peluru bersarang di tubuhnya.

### C. SUMBER DATA

Kementerian Sosial RI.

## 5. Almarhum Raden Aria Wangsakara



### A. RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap	: K.H. Ahmad Sanusi
Orang tua	
- Ayah	: K.H. Abdurrahim
- Ibu	: Empok
Tempat, tanggal lahir	: Sukabumi, 18 September 1888
Wafat	: 31 Juli 1950
Tempat Pemakaman	: Sukabumi, Jawa Barat
Status Pernikahan	: Menikah
Istri	: Siti Maryam
Anak	: 1. K.H. Acep Zarkasyi Sanusi; 2. K.H.A.M. Badri Sanusi; 3. K.H. Ahmad Juwaeni; 4. K.H. Nunung Najmuddin Sanusi; 5. Prof. Dr. K.H. Sholahuddin Sanusi; 6. Dr.K.H. Didin Muhibuddin Sanusi; 7. K.H. Fadlullah Sanusi (Acep FAdsyah);

### B. RIWAYAT HIDUP

K.H. Ahmad Sanusi telah memimpin dan melakukan perjuangan politik melawan pemerintah Kolonial Belanda. Ulama yang dikenal sebagai Ajengan Genteng ini dianggap merongrong kewibawaan pemerintah colonial melalui fatwa-fatwanya. Akibat fatwa-fatwa melawan kebijakan pemerintah colonial dan aparat pribumi yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah colonial. Ia dianggap membahayakan pemerintah. K.H. Ahmad Sanusi ditangkap pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1927 dan ditahan tanpa peradilan di Batavia selama 5 tahun. Dari Penjara pada bulan November 1931, ia mendirikan dan memimpin Al-Ittihadyatul Islamiyah (AI), organisasi paling militan di Kabupaten Priangan dan Bogor, sehingga sekeluar dari tahanan di Batavia, ia dikenakan status tahanan kota selama 7 tahun.

K.H. Ahmad Sanusi telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara dan K.H. Ahmad Sanusi telah menghasilkan Karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. K.H. Ahmad Sanusi menjadi pembaharu dalam Pendidikan Islam. Ia adalah ulama pertama yang menulis tafsir Ketika orang diharamkan menulis ayat Al-Quran di papan tulis dan menuliskan isi Al-Quran dalam huruf latin untuk membantu mereka yang tidak bisa membaca huruf Arab. Selama di tahan, K.H. Ahmad Sanusi banyak menulis buku baik dalam Bahasa

sunda maupun Melayu dalam aksara Latin maupun Arab, yang memuat pemikiran-pemikirannya. Berbagai permasalahan keagamaan yang muncul waktu itu dapat dijawab melalui buku-buku ini sehingga popularitasnya sangat meningkat. Ia juga aktif sebagai penasehat Sarekat Islam di Sukabumi dan mampu menarik masyarakat untuk menjadi anggotanya di Sukabumi hingga mencapai 16.000 orang.

Pengabdian dan perjuangan yang dilakukan K.H. Ahmad Sanusi berlangsung hamper sepanjang hidupnya (tidak sesaat) dan melebihi tugas yang diembannya. Sejak muda, K.H. Ahmad Sanusi telah berjuang melalui dakwah di Pesantren Cantayan di desa kelahirannya, kemudian aktif sebagai penasehat Sarekat Islam, mendirikan All, mendirikan pesantren Genteng. Pada masa pendudukan Jepang, K.H. Ahmad Sanusi aktif pula dalam mendirikan pasukan sukarela Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor dan Sukabumi. Tahun 1944 ia diangkat menjadi anggota BPUPKI. Selanjutnya, setelah proklamasi kemerdekaan RI, K.H. Ahmad Sanusi diangkat sebagai anggota KNIP dan ikut hijrah ke Yogyakarta setelah perjanjian Renville. Setelah perang Kemerdekaan Kembali ke Sukabumi hingga meninggal Dunia pada tahun 1950.

Perjuangan yang dilakukannya mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. All yang didirikan dari Penjara, ternyata berkembang semakin membesar. Meskipun dikatakan bukan organisasi politik, namun All berkembang menjadi organisasi sosial yang paling militant dengan 24 cabang di Karisidenan Priangan dan Bogor dan Batavia. Aktifitasnya bukan hanya di bidang dakwah dengan ribuan pengikut, namun juga dalam bidang politik, Bersama-sama dengan tokoh pergerakan nasional lainnya. Pemikirannya ikut mewarnai BPUPKI Ketika merumuskan dasar negara

Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan/nasionalisme yang tinggi. Ketika K.H. Ahmad Sanusi dipenjara di Batavia selama lima tahun, pengikutnya dalam jumlah ribuan orang terus berdatangan, bukan sekedar menjenguk namun juga untuk mendapatkan nasehat-nasehat keagamaan dan berbagai persoalan lainnya. Dari dalam penjara, pada tahun 1931, K.H. Ahmad Sanusi, mendirikan Al Ittihadyatul Islamiyah (All), menerbitkan majalah Al-Hidayatul Islamiyah, mendirikan sekolah All School, sekolah dengan kurikulum modern untuk pertamakalinya di Indonesia. K.H. Ahmad Sanusi mengajarkan tentang isi Al-Quran yang berkaitan dengan harga diri, persamaan, persaudaraan, nasionalisme, dan kemerdekaan. Tidak jarang usai pertemuan, emosi massa menjadi tidak terkendali, sehingga sering timbul kerusuhan anti colonial. Tahun 1937 didirikannya Barisan Islam Indonesia yang sering menggunakan seragam militer dalam kesempatan resmi. Gerakan-gerakannya yang dianggap membahayakan pemerintah colonial menyebabkan K.H. Ahmad Sanusi selalu berada dalam status tahanan kota hingga baru dibebaskan pada tahun 1939.

K.H. Ahmad Sanusi memiliki ahlak dan moral keagamaan yang tinggi. Sebagai seorang putera ulama, K.H. Ahmad Sanusi, sejak kecil dididik dalam lingkungan pesantren milik ayahnya. Kemudian ia menempuh Pendidikan di berbagai pesantren hingga ke Mekkah dan menuntut ilmu selama enam tahun di sana. Tidak pernah diberitakan K.H. Ahmad Sanusi berperilaku buruk, kecuali dalam pemberitaan yang bersumber dari pemerintah colonial.

K.H. Ahmad Sanusi tidak pernah menyerah pada lawan/ musuh dalam perjuangan. Selama di Penjara K.H. Ahmad Sanusi tidak patah semangat, malah ia mendirikan All. Meskipun terus-menerus berstatus sebagai tahanan kota, jiwa juangnya tidak pernah surut. Ketika Jaman Jepang semua organisasi di bekukan K.H. Ahmad Sanusi terpaksa menggunakan taktik politik kooperasi dengan mau diangkat sebagai Dewan Penasehat Karisidenan Bogor, agar ia tetap bisa berjuang melalui All, meskipun dengan mengganti nama All menjadi Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII).

Dalam Riwayat hidupnya, K.H. Ahmad Sanusi tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuangannya.

### C. SUMBER DATA

Kementerian Sosial RI.